

## **INFORMASI VAKSIN DI MEDIA SOSIAL DAN PROGRAM VAKSIN COVID-19: LANGKAH APA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA?**

**Era Purike**

Politeknik Pajajaran ICB Bandung, Indonesia  
Correspondensi author email: era.purike@poljan.ac.id

**Astria Baiti**

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

### **ABSTRACT**

*The use of social media today has become one of the vital needs both in society and institutions. The public can easily access a variety of information through their technological devices. In 2019, social media users in Indonesia had reached 150 million users, and health information accessed by the public can shape diverse public opinions on vaccination programs. Research is needed to search the relationship between vaccine information available on social media that is accessed by the public with the attitude taken by the community towards the vaccination program and what steps can be taken by the government of the Republic of Indonesia to make it well-implemented. This study uses a qualitative method by using a literature review of several national and international journals relevant to the research topic. The results showed that the majority (43%) of the information available on the internet presented incorrect information about vaccines. Furthermore, it can be seen that the top 10 websites in the search engines show an anti-vaccine attitude. With many social media users in Indonesia and the lack of scientific sources that the public can access regarding vaccines, this dramatically affects people's attitudes towards vaccination programs. In addition, the small number of followers from all social media platforms owned by the government in disseminating information about the vaccination program. Three main factors can influence people's attitudes towards vaccines. The first is socio-cultural and demographic factors. The second factor is health communication, and the third factor is political conditions or distrust of the government. Therefore, it is necessary to take anticipatory steps from the government following these three factors so that the vaccination program would reach successful implementation.*

**Keywords:** *vaccine, anti-vaccine, social media, communication*

## ABSTRAK

*Penggunaan media sosial saat ini telah menjadi salah satu kebutuhan vital baik di masyarakat maupun institusi atau lembaga. Beragam informasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui perangkat teknologi yang mereka miliki. Tahun 2019, pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai 150 juta pengguna dan informasi kesehatan yang diakses oleh masyarakat dapat membentuk opini publik yang beragam pula terhadap program vaksinasi. Untuk itu diperlukan adanya penelitian mengenai keterkaitan antara informasi vaksin yang ada di media sosial yang diakses oleh masyarakat dengan sikap yang diambil oleh masyarakat terhadap program vaksinasi dan langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia agar program vaksinasi dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan kajian literatur beberapa jurnal nasional dan internasional yang sangat relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas (43%) informasi yang tersedia di internet menyajikan informasi yang salah mengenai vaksin. Hal ini dapat dilihat bahwa 10 situs website teratas dalam mesin pencarian menunjukkan sikap anti-vaksin. Dengan banyaknya pengguna media sosial di Indonesia dan sedikitnya sumber ilmiah yang dapat diakses oleh masyarakat mengenai vaksin, maka hal ini sangat berpengaruh terhadap sikap masyarakat terhadap program vaksinasi. Ditambah lagi sedikitnya jumlah pengikut dari seluruh platform media sosial yang dimiliki oleh pemerintah dalam menyebarkan informasi mengenai program vaksinasi. Ada tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap vaksin. Yang pertama adalah faktor sosio-kultural dan demografi. Faktor kedua adalah komunikasi kesehatan dan faktor ketiga adalah kondisi politik atau ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu perlu adanya langkah-langkah antisipatif dari pemerintah sesuai dengan ketiga faktor tersebut agar program vaksinasi dapat berjalan dengan baik.*

**Kata kunci:** *vaksin, anti-vaksin, media sosial, komunikasi.*

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi akhir-akhir ini telah menjadi salah satu kebutuhan vital bagi masyarakat. Penggunaannya menjadi sebuah hal yang sangat umum di masyarakat, bukan hanya masyarakat di perkotaan namun juga di wilayah pedesaan. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi ini pun telah menyebarluas dari hubungan komunikasi antar individu menjadi antar lembaga, antar wilayah bahkan antar benua. Tidak sulit bagi kita untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang terjadi di belahan dunia lain hanya dengan peralatan teknologi yang bernama ponsel pintar (*smartphone*) di genggaman tangan kita. Hal ini menyebabkan semakin meluasnya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Namun sayangnya meluasnya informasi yang bisa diakses oleh masyarakat di Indonesia khususnya tidak diikuti oleh tingkat literasi yang memadai. Berdasarkan

survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada 2019 menyatakan bahwa tingkat literasi Indonesia pada penelitian di 70 negara itu berada di nomor 62. Literasi merupakan kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan (Utami, 2021). Sementara berdasarkan laporan survei dari Hootsuite pada tahun 2021, saat ini pengguna media sosial di dunia mencapai 4,22 miliar jiwa. Angka ini meningkat 13% dengan jumlah pengguna baru mencapai 490 juta selama 12 bulan terakhir. Jika diakumulasikan, rata-rata lebih dari 1,3 juta pengguna baru di media sosial setiap hari selama 2020, atau sekitar 155.000 pengguna baru setiap detik. Laporan ini juga menyebutkan bahwa pengguna media sosial di dunia akan menghabiskan 3,7 triliun jam berselancar di media sosial pada 2021 (Riadi, 2021). Mengutip dari Katadata yang menyebutkan bahwa pengguna aktif media sosial di Indonesia mengalami peningkatan 20% di tahun 2019 yakni mencapai 150 juta pengguna. Jumlah ini menempatkan Indonesia menjadi negara keempat di dunia sebagai pengguna media sosial terbanyak (Arifin, 2019).

Pengguna media sosial juga dengan mudah mengakses informasi terkait kesehatan yang banyak beredar di berbagai bentuk platform media sosial yang ada. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa situs web media sosial yang populer terbukti efektif dan ampuh untuk menyebarluaskan informasi kesehatan (Emy Leonita, 2018). Dengan meningkatnya pengguna media sosial di masa pandemi saat ini, tentu berdampak pada semakin meluasnya informasi kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat. Hampir seluruh pemerintah di dunia mengambil kebijakan vaksin sebagai salah satu langkah untuk dapat mengakhiri pandemi saat ini. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat pandemis yang terjadi secara global saat ini sangat berdampak pada banyak aspek kehidupan manusia sehingga pemerintah harus mengambil langkah-langkah kebijakan secara cepat dan tepat untuk dapat menanggulangi pandemi ini. Salah satu kebijakan yang diambil untuk menanggulangi pandemi ini adalah kebijakan vaksin. Vaksin Covid-19 atau SARS-CoV-2 merupakan komponen yang penting untuk mengakhiri pandemi Covid-19 karena dapat menurunkan penyebaran virus dan meningkatkan imunitas masyarakat terhadap penyakit (Latkin, 2021). Masa pandemi dimana jarak sosial dibatasi dan aktivitas yang mengumpulkan banyak orang juga dibatasi, sehingga penyebaran informasi mengenai kebijakan vaksin dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa platform media sosial. Dengan besarnya antusias masyarakat dalam mengakses media sosial diharapkan informasi mengenai kebijakan vaksin dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat sehingga kebijakan vaksin Covid-19 ini mendapatkan dukungan dari masyarakat (Romy Froehlich, 2006).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan kajian literatur dari beberapa penelitian yang memiliki kemiripan terutama mengenai akses informasi tentang vaksin dari media sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan vaksin Covid-19. Penelitian ini merangkum beberapa literatur yang terkait dengan informasi vaksin di media social dan dampaknya terhadap keputusan vaksin yang diambil oleh masyarakat. Penulis melakukan telaah terhadap beberapa jurnal internasional yang paling relevan dengan topik penelitian dan beberapa artikel di jurnal nasional yang relevan dengan kondisi di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan komunikasi dan teknologi saat ini sangatlah pesat dan kebutuhan masyarakat terhadap komunikasi dan teknologi semakin meningkat terutama di masa pandemi saat ini yang terjadi secara global. Setiap orang dipaksa untuk menjalankan protokol kesehatan salah satunya dengan membatasi kegiatan berkumpul dan melakukan kontak fisik dengan orang lain. Untuk mengatasi dampak pandemi semakin meluas, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan program vaksinasi. Kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat dan mudah diakses sejalan dengan perkembangan komunikasi dan teknologi. Oleh karena itu, saat ini bukan hanya masyarakat yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini tapi juga semua lembaga/institusi saat ini memanfaatkan teknologi untuk menyebarluaskan informasi yang dimiliki kepada masyarakat luas. Saat ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses beragam informasi yang tersebar di internet terutama dari perangkat komunikasi seperti telepon pintar (smartphone). Terlepas dari apakah informasi yang diakses oleh masyarakat merupakan informasi yang akurat, tepat, dan terkini, sebagian besar informasi tersebut sudah diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosini dan Siti Nurningsih (2018) mengenai Pemanfaatan Media Sosial Untuk Pencarian dan Komunikasi Informasi Kesehatan, ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh masyarakat mengapa menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi kesehatan, diantaranya adalah: (1) Ada berbagai fasilitas untuk *share*, memberikan komentar, membalas percakapan, *tagging*, dan unggah foto. Alasan lainnya adalah (2) Semua teman menggunakannya, (3) adanya berbagai fasilitas yang memudahkan pencarian informasi kesehatan, dan (4) Tampilannya nyaman untuk dilihat dan digunakan serta Ada notifikasi (pemberitahuan).

Untuk menyebarluaskan mengenai kebijakan vaksin Covid-19, pemerintah Indonesia juga menggunakan beberapa *platform* media sosial. Berdasarkan informasi

di laman resmi [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id), pemerintah memiliki akun di seluruh platform media sosial yang ada. Daftar media sosial yang digunakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1: Jenis Media Sosial Satgas Covid-19

No	Jenis Media Sosial	ID Media Sosial	Jumlah Pengikut (Ribu)
1.	Facebook	Lawan Covid19 ID	2,1
2.	Instagram	<a href="https://www.instagram.com/lawancovid19_id">instagram.com/lawancovid19_id</a>	-
3.	Twitter	<a href="https://twitter.com/lawancovid19_id">twitter.com/lawancovid19_id</a>	3,9
4.	YouTube	Lawan COvid19 ID	4,56
5.	TikTok	<a href="https://www.tiktok.com/lawancovid19_id">tiktok.com/lawancovid19_id</a>	24,8

Keterangan:

Akun instagram yang disebutkan di atas diarahkan ke [www.who.int](http://www.who.int)

Sumber: Olahan data peneliti

Jumlah pengikut yang tidak memadai menyebabkan sedikitnya masyarakat yang mengakses informasi yang diberikan di platform media sosial yang dimiliki pemerintah terkait pandemi Covid-19. Dari beberapa literatur yang ditelaah oleh (Lucy E Elkin, 2020) terutama penelitian yang dilakukan oleh Davies P, Chapman S, Leask (2002) menyatakan bahwa 43% situs jika kita melakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci vaksin maka yang keluar adalah informasi mengenai anti-vaksin dan 10 (sepuluh) situs teratas merupakan situs anti vaksin. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Ruiz dan Bell (2014) yang menyatakan bahwa 16,7% website pencarian informasi vaksin berisi paling tidak satu informasi yang salah mengenai vaksin. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Buchanan dan Beckett (2014) yang menemukan bahwa 43% dari halaman, kelompok dan lokasi yang ada di platform media sosial Facebook dianalisa sebagai penyebarluasan anti-vaksin (Lucy E Elkin, 2020). Sementara World Health Organisation (WHO) pada tahun 2019, menyatakan bahwa keengganan untuk divaksin menjadi satu dari 10 (sepuluh) ancaman teratas terhadap kesehatan masyarakat dimana Mathew Toll dan Ang Li menyebutkan bahwa keengganan untuk divaksin ini disebut sebagai sifat negatif atau disebut juga sebagai anti-vaksin (Mathew Toll, 2020).

Kebijakan vasin di beberapa negara juga mengalami hambatan karena adanya kesalahan informasi yang menyebabkan masyarakat menjadi anti-vaksin. Seperti yang dikemukakan oleh Matthew Motta, Timothy Callaghan, dan Steven Sylvester (2018) dalam penelitian mereka, bahwa sikap anti-vaksin dipicu oleh sikap masyarakat yang merasa bahwa mereka lebih paham mengenai penyebab sebuah penyakit daripada keahlian para ilmuwan dan tenaga medis. Mereka yang merasa lebih paham daripada ahli medis akan mengambil peran dalam proses pengambilan keputusan yang

berhubungan dengan vaksin. Menurut Larson et al., (2011); Carpiano dan Fitz (2017), sikap publik terhadap vaksin ditentukan oleh beberapa hal yang kompleks dan dipicu oleh hal-hal yang ilmiah, kondisi psikologis, sosial budaya, dan faktor politik (Matthew Motta, 2018).

Penelitian terbaru yang dilakukan Latkin, et.al., (2021) terkait beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19 adalah:

1. Keengganan untuk mendapatkan vaksinasi karena takut akan efek samping yang serius
2. Persepsi ketidakpercayaan pada pembuat vaksin atau meragukan kemampuan perusahaan farmasi untuk membuat dan mendistribusikan vaksin COVID-19 yang aman dan efektif
3. Terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap akibat terfragmentasi nya informasi yang menyebar selama pandemi COVID-19
4. Kepercayaan pada pembuat kebijakan (pemerintah) juga dapat memengaruhi persepsi publik tentang manfaat vaksin COVID-19. Survei global mengenai potensi penerimaan vaksin COVID-19 mulai Juni 2020 menemukan bahwa negara-negara dengan penerimaan vaksin yang tinggi cenderung merupakan negara-negara dengan kepercayaan yang kuat kepada pemerintah pusat, seperti China dan Korea Selatan (Lazarus et al., 2020).
5. Ada penelitian substansial tentang misinformasi COVID-19 dan peran media sosial dalam menyebarkan misinformasi COVID-19 (Center for Informed Democracy & Social Cybersecurity, 2020). Hal ini disebabkan karena minimnya informasi terpercaya yang diberikan oleh pemerintah sehingga masyarakat lebih mempercayai informasi palsu (hoax) yang tersebar di media sosial.
6. Karakteristik sosio-demografi juga dapat menyebabkan persepsi atau penerimaan terhadap vaksin yang secara signifikan berbeda (Reiter et al., 2020).
7. Penerimaan sosial dari teman sebaya atau anggota jejaring social juga mempengaruhi tingkat kepercayaan individu terhadap manfaat vaksin. Sikap dan perilaku individu dipengaruhi oleh anggota jejaring sosial mereka.

Melihat beberapa penelitian yang dikemukakan diatas maka diperlukan adanya langkah antisipatif yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan program vaksin Covid-19 di Indonesia.

### **A. Faktor Sosio-Kultural dan Demografi**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa sikap masyarakat terhadap vaksin juga ditentukan oleh kondisi sosiokultural dan demografi masyarakat. Menurut Jianping Li, et.al., (2020), pemerintah perlu menyeimbangkan antara budaya dan

kebijakan. Untuk menyeimbangkannya diperlukan enam langkah. Pertama, komunikasi dan kolaborasi lintas budaya, terutama di antara komunitas ilmiah dan teknologi, harus diperkuat dalam menghadapi epidemi. Kolaborasi multilateral di seluruh dunia dapat memainkan peran penting dalam berbagi pengalaman, mempercepat penelusuran virus corona baru, pengembangan vaksin, dan penyebaran materi pencegahan epidemi secara global. Secara khusus, melacak varian baru dari virus corona adalah tanggung jawab komunitas ilmiah dan teknologi di seluruh dunia, dan kerja sama dalam berbagi informasi harus diperkuat untuk mempercepat penanganan masalah ilmiah ini.

Kedua, semua negara dan pemerintah di dunia harus memperkuat sistem berbagi data dan informasi untuk secara efektif melacak penelitian virus corona dan bersama-sama mengembangkan alat uji, vaksin, dan terapi yang efektif berbiaya rendah di bawah inisiatif organisasi internasional seperti WHO. Selanjutnya, hak kekayaan intelektual yang dihasilkan harus dimiliki oleh semua negara.

Ketiga, dengan pertimbangan budaya dan sosialnya sendiri, setiap negara atau pemerintah harus secara serius mengadopsi pengalaman awal yang dipelajari di negara lain untuk kemudian dapat disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural dan demografi di tiap negara alokasi terkoordinasi sumber daya medis nasional menggunakan platform manajemen informasi modern untuk menghindari potensi kejenuhan kapasitas medis. Keempat, setiap negara dan pemerintah harus mengambil kesempatan unik ini untuk mengevaluasi sistem kesehatan masyarakatnya sehingga dapat melakukan pembuatan kebijakan yang baik dalam persiapan menghadapi pandemi di masa depan.

Kelima, pemerintah dapat mengembangkan strategi baru untuk mempromosikan komunitas virtual. Hal ini dilakukan agar dapat mengatasi masalah Kesehatan mental akibat adanya pembatasan sosial di masyarakat. Terakhir, penutupan akibat virus corona telah menghasilkan manfaat iklim dan lingkungan yang lebih baik. Oleh karena itu, negara-negara harus mampu tetap menjaga hal ini jika pandemi telah berlalu untuk kelangsungan hidup manusia.

## **B. Faktor Komunikasi**

Komunikasi kesehatan adalah bidang yang berkembang yang telah bergeser dari penekanan pada pendidikan kesehatan menuju perilaku dan perubahan sosial. Namun sangat disayangkan bahwa masih sedikit informasi dalam literatur tentang intervensi komunikasi untuk promosi vaksinasi, meskipun dialog antar komunitas dan media massa mulai menarik perhatian publik (Susan Goldstein, 2015). Mengutip laporan dari Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) Working Group on Vaccine Hesitancy (WG) mempertimbangkan apakah komunikasi yang buruk merupakan penentu keraguan vaksin dan menyimpulkan bahwa komunikasi adalah alat untuk mengatasi keraguan vaksin, bukan penentu. WG juga mencatat

bahwa komunikasi yang buruk dapat merusak penerimaan vaksin di masyarakat. Negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah, sumber daya komunikasi yang minim merupakan beberapa factor yang membatasi kapasitas untuk melawan informasi negatif tentang vaksin dan sulit untuk mendapatkan dukungan masyarakat untuk program vaksinasi (Susan Goldstein, 2015).

Menurut Susan Goldstein, Noni E. MacDonald, Sherine Guirguis dan the SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy berdasarkan beberapa penelitian terkait hal ini, agar komunikasi kesehatan terutama mengenai vaksin dapat efektif maka ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan. Pertama, perlu proaktif. Strategi komunikasi harus diintegrasikan ke dalam perencanaan program imunisasi sejak awal. Kurangnya komunikasi di awal dapat menyebabkan masalah serius dengan pelaksanaan program, dan membuka ruang untuk komunikasi oleh orang-orang dan organisasi dengan kepentingan anti-vaksin atau keyakinan agama. Kedua, komunikasi adalah proses dua arah. Hal ini setara dengan proses mendengarkan dan menceritakan. Memahami perspektif orang-orang yang menjadi sasaran layanan imunisasi, dan keterlibatan mereka dengan masalah ini, sama pentingnya dengan informasi yang ingin dikomunikasikan oleh para ahli. Oleh karena itu, penelitian formatif merupakan komponen penting dari perencanaan komunikasi. Ketiga, komunikasi lebih efektif bila didasarkan pada hal-hal ilmiah mengenai program vaksinasi/imunisasi. Keempat, memilih dan menggunakan alat komunikasi yang tersedia dan menggunakannya secara kreatif untuk melibatkan kelompok sasaran dalam dialog. Peran media sosial dalam pengambilan keputusan vaksin individu dan komunitas masih belum sepenuhnya dipahami. Konten media sosial perlu dipantau dengan lebih baik sehubungan dengan sikap terhadap vaksin dan pengaruh jejaring sosial online, baik untuk orang dewasa maupun anak-anak dan dalam jejaring sosial yang berbeda. Kampanye komunikasi massa – baik online maupun offline – mungkin lebih efektif dalam membangun dukungan untuk program vaksinasi atau mempertahankan norma sosial vaksinasi ulang. Mereka mungkin juga terbukti kontraproduktif dengan subkelompok yang sangat menentang vaksinasi (Nyhan B, Reifler J, Richey S, Freed GL., 2014).

Ilmu komunikasi tidak dapat dipisahkan dari ilmu komunikasi kebijakan pemerintah. Fokus utama dari ilmu komunikasi dan pendidikan terutama di tingkat masyarakat perlu memiliki kepekaan budaya. Aspek kunci dari upaya ini adalah mengembangkan standar etika dalam memberikan respon terhadap krisis yang ada (Benjamin M. Vallejo Jr, 2020). Untuk meminimalisir hasil negatif dari komunikasi kesehatan terutama mengenai vaksinasi maka diperlukan mobilisasi pemain media sosial terutama para ahli untuk dan pemerintah untuk mengarahkan perhatian publik pada sumber informasi sains yang tepercaya. Ini harus menjadi upaya utama pemerintah dalam menanggapi ketidakpercayaan maskat terutama dalam aspek keamanan vaksin dan efek samping dari vaksin. Sehingga informasi palsu yang

beredar di media sosial dapat diminimalisir jika masyarakat terus diarahkan pada sumber informasi sains yang terpercaya (Limaye RJ, 2020).

### **C. Faktor Ketidakpercayaan Terhadap Pemerintah**

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap program vaksinasi adalah kondisi politik atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah terutama dalam kepercayaan masyarakat terhadap keamanan vaksin. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah dapat berkontribusi pada keraguan vaksin dan penolakan vaksin dari masyarakat. Terutama jika masyarakat mendapatkan informasi yang salah mengenai program vaksinasi, atau jika masyarakat menggunakan praktisi pengobatan komplementer/alternatif, dan persepsi negatif mereka terhadap kebijakan program vaksinasi. Hal-hal seperti inilah yang dapat menambah keraguan masyarakat terhadap vaksin (Charlotte Lee, 2016).

Untuk itu pemerintah perlu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan tenaga kesehatan, sistem biomedis, dan teknologi vaksin yang semuanya diperlukan untuk menciptakan lingkungan penerimaan vaksinasi (Streefland P, 1999). Instansi pemerintah perlu menjangkau masyarakat yang enggan divaksin melalui pihak-pihak diluar pemerintah terutama penyedia layanan kesehatan. Pemerintah memerlukan teknik komunikasi yang lebih efektif dan inovatif untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terutama memanfaatkan teman sebaya seperti asosiasi profesional, kelompok agama, dan juga memperkuat hubungan antara pejabat kesehatan dengan praktisi pengobatan alternatif agar dapat menjangkau masyarakat yang masih ragu tentang program vaksinasi (Charlotte Lee, 2016).

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Media sosial merupakan media yang paling efektif dan ampuh dalam menyebarkan informasi kesehatan. Dengan jumlah pengguna mencapai 150 juta pada tahun 2019, media sosial menjadi rujukan banyak masyarakat dalam mengakses informasi Kesehatan. Namun sayangnya informasi beragam yang tersedia dalam beragam platform media sosial 43% nya menyediakan informasi yang salah mengenai vaksin. Ada tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap vaksin. Yang pertama adalah faktor sosio-kultural dan demografi. Faktor kedua adalah komunikasi kesehatan dan faktor ketiga adalah kondisi politik atau ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu perlu adanya langkah-langkah antisipatif dari pemerintah agar program vaksinasi dapat berjalan dengan baik. Langkah-langkah tersebut merupakan solusi dari ketiga faktor yang telah disebutkan sebelumnya.

Pemerintah perlu untuk memperhatikan ketiga faktor utama yang dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap vaksin dan dapat melaksanakan langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagaimana telah penulis paparkan pada hasil dan

pembahasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal/Prosiding/Disertasi/Tesis/Skripsi

- Benjamin M. Vallejo Jr, R. A. (2020). Policy responses and government science advice for the COVID 19 pandemic in the Philippines: January to April 2020. *Progress in Disaster Science* 7 (2020) 100115.
- Charlotte Lee, K. W. (2016). Hurdles to herd immunity: Distrust of government and vaccine refusal in the US, 2002–2003. *Vaccine* 34 , 3972–3978.
- Emy Leonita, N. J. (2018). Peran Media Sosial dalam Upaya Promosi Kesehatan: Tinjauan Literatur. *Jurnal Inovasi Vokasional dan Teknologi Volume 18 Number 2*, 25-34.
- Jianping Li, e. (2020). Culture versus Policy: More Global Collaboration to Effectively Combat COVID-19. *The Innovation* 1, 100023, 1-2.
- Latkin, C. D. (2021). Trust in a COVID-19 vaccine in the U.S.: A social-ecological perspective. *Social Science & Medicine*, 1-34.
- Limaye RJ, S. M. (2020). Building trust while influencing online COVID-19 content in the social media world . *Lancet Digital Health*. [https://doi.org/10.1016/S2589-7500\(20\)30084-4](https://doi.org/10.1016/S2589-7500(20)30084-4).
- Lucy E Elkin, S. R. (2020). ‘Should I vaccinate my child?’ comparing the displayed stances of vaccine information retrieved from Google, Facebook and YouTube. *Vaccine*, <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.02.041>, 1-8.
- Mathew Toll, A. L. (2020). Vaccine sentiments and under-vaccination: Attitudes and behaviour around Measles, Mumps, and Rubella vaccine (MMR) in an Australian cohort. *Vaccine*, <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.11.021>, 1-9.
- Matthew Motta, T. C. (2018). Knowing less but presuming more: Dunning-Kruger effects and the endorsement of anti-vaccine policy attitudes. *Social Science & Medicine* 211 , 274–281.
- Romy Froehlich, B. R. (2006). Framing political public relations: Measuring success of political communication strategies in Germany. *Public Relations Review* 32, 18–25.
- Rosini, S. N. (2018). Pemanfaatan media sosial untuk pencarian dan komunikasi informasi kesehatan. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol. 14, No. 2*, 226-237.
- Streefland P, C. A.-J. (1999). Patterns of vaccination acceptance. *Soc Sci Med* 1999;49(12):1705–16., 1705-1716.
- Susan Goldstein, N. E. (2015). Health communication and vaccine hesitancy. *Vaccine* 33 , 4212–4214.

### Lain-lain

- Arifin, C. (2019, Juni 19). Pengguna Sosial Media di Indonesia Terbesar Keempat di Dunia. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Riadi, Y. (2021, Februari 3). Jumlah Pengguna Media Sosial di Dunia Mencapai 4,2 Miliar. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

Utami, L. D. (2021, Maret 23). *Tingkat Literasi Indonesia di Dunia Rendah, Ranking 62 Dari 70 Negara*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.